

**JURNAL HARMONI**

ISSN:1412-663X, e-ISSN:2502-8472

---

**ISLAM-KRISTEN DI “KOTA KALONG”: BEST PRACTICE  
PEMBANGUNAN RUMAH IBADAT BERBASIS KEARIFAN  
LOKAL**

**ISLAM-CHRISTIAN IN “KOTA KALONG”: BEST PRACTICE  
IN BUILDING THE HOUSE OF WORSHIP BASED ON LOCAL  
WISDOM**

**Muhammad Irfan Syuhudi**

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, Indonesia  
irfansyuhudi@gmail.com

**Nensia**

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, Indonesia  
nensia.s@gmail.com

Artikel diterima 23 September 2021, diseleksi 5 Desember 2021, dan disetujui 27 Desember 2021  
DOI: <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i2.511>

**Abstract**

*Rejection and destruction of a certain house of worship are often found in various regions in Indonesia, especially after the issuance of PBM Numbers 9 and 8 of 2006. Generally, when a house of worship of the religious minority group is to be built, the majority tends to carry out rejection and destruction. This article aims to describe the best practices for building houses of worship in Soppeng Regency as well as local wisdom related to the construction of houses of worship. Using this type of qualitative research, data collection was carried out through interviews, observations, and literature studies, and analyzed descriptively-qualitatively. Informants included Muslim and Christian religious leaders, Soppeng Regency FKUB, Soppeng MUI, and the community. This study found: (1) There has never been a case of rejection and destruction of a house of worship in Soppeng. Although all churches were established long before the publication of PBM Numbers 9 and 8 of 2006, Muslims until now have never questioned the renovation of the church. Since it was first built, all churches in Soppeng have undergone several renovations. In addition, Muslims have never questioned the location of the church, which stands in the middle of a Muslim*

**Abstrak**

Penolakan dan pengrusakan terhadap sebuah rumah ibadat tertentu kerap kali dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, terutama pasca terbitnya PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006. Umumnya, saat hendak membangun rumah ibadat, kelompok agama terbanyak (mayoritas) cenderung melakukan aksi tersebut (penolakan dan perusakan) terhadap kelompok agama minoritas. Artikel ini ingin mendeskripsikan *best practice* pembangunan rumah ibadat di Kabupaten Soppeng, serta kearifan lokal terkait pembangunan rumah ibadat. Menggunakan jenis penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur, serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Informan mencakup tokoh agama Islam dan Kristen, FKUB Kabupaten Soppeng, MUI Soppeng, dan masyarakat. Penelitian ini menemukan: (1) Belum pernah ada kasus penolakan dan perusakan terhadap rumah ibadat di Soppeng. Meski semua gereja (enam gereja) berdiri jauh sebelum terbit PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006, dan di antaranya ada yang menjadi saksi bisu orang Bugis-Soppeng memeluk Kristen, namun umat Islam hingga

*settlement; (2) One of the causes of harmonious relations between Muslims and Christians is brotherhood and kinship. Until now, the Soppeng Bugis still have siblings and relatives of different religions, and some of them live in harmony living under the same roof. Also, the people uphold the local wisdom inherited from their parents, Iyassi Soppengngi, Soppeng Belongs to Us Together.*

**Keywords:** Houses of Worship, PBM No. 9 and 8 of 2006, Local Wisdom, Islam-Christian Bugis

kini tidak pernah mempersoalkan renovasi gereja. Sejak pertama kali dibangun, semua gereja di Soppeng telah mengalami beberapa kali renovasi. Selain itu, umat Islam juga tidak pernah mempermasalahkan lokasi gereja, yang berdiri di tengah pemukiman penduduk Muslim; (2) Salah satu penyebab harmonisnya hubungan orang Islam dan Kristen, adalah persaudaraan dan kekerabatan. Sampai saat ini, orang Bugis Soppeng masih punya saudara kandung dan kerabat berlainan agama, dan di antara mereka ada yang hidup rukun tinggal satu atap. Juga, orang Soppeng memegang teguh kearifan lokal warisan orang tua. Salah satunya, *Iyassi Soppengngi*, Soppeng Milik Kita Bersama.

**Kata Kunci:** Rumah Ibadat, PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, Kearifan Lokal, Islam-Kristen Bugis

## PENDAHULUAN

Dalam sejumlah penelitian kualitatif, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, dikenal sebagai daerah rukun dan aman dari segala macam konflik bernuansa agama. Toleransi antarumat beragama di daerah yang dikenal juga dengan sebutan “Kota Kalong” berjalan cukup bagus. Salah satu penyebabnya, masih ada orang Muslim dan Kristen bersaudara kandung atau memiliki kerabat dekat (sepupu sekali) dengan orang berbeda agama. Bahkan, di antara mereka, masih ada tinggal satu rumah sampai sekarang, dan hubungan mereka tetap baik-baik saja (Ahmad, 2015), (Rahman, 2016), (Suhasran, 2018).

Di Soppeng, pembangunan rumah ibadat juga tidak pernah menemui kendala. Umat Islam sebagai pemeluk terbanyak di Soppeng belum pernah sekalipun melarang pendirian atau renovasi gereja. Terdapat enam gereja di Soppeng, di mana di sekitar gereja dihuni kebanyakan umat Islam. Hal ini, tentu saja, kontras dengan pemandangan

di beberapa tempat di Indonesia, di mana kelompok yang jumlahnya sedikit (minoritas) cukup kesulitan membangun rumah ibadat, karena mendapat penolakan dari kelompok agama mayoritas.

Di Jawa Barat, misalnya. Daerah ini disebut-sebut paling banyak terjadi kasus pelarangan izin pendirian rumah ibadat hingga penutupan (Sanusi, 1999). Adon Nasrullah Jamaluddin (2018), yang meneliti di Bekasi menyebutkan, ada empat persoalan terkait pendirian rumah ibadat di Bekasi, di antaranya, (1) pembangunan rumah ibadat baru beserta perizinannya; (2) penggunaan fasilitas umum seperti rumah, ruko, dan lapangan “disulap” menjadi tempat ibadat dan kebaktian; (3) protes lingkungan warga sekitar terhadap keberadaan rumah ibadat; dan (4) pencabutan izin pendirian gereja oleh kepala daerah (walikota). Gereja-gereja tersebut sebenarnya telah memiliki izin, tetapi atas desakan kelompok agama lain, pejabat kemudian mencabut izinnya (Jamaluddin, 2018).

Di wilayah timur Indonesia, sering pula terjadi penolakan pembangunan rumah ibadat. Antara lain, umat Kristen menolak pembangunan mushalla di Perum Griya Agape di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, pada 2020, seperti ditulis Syuhudi dan Sitti Arafah (2020). Bahkan, beberapa umat Kristen merusak fasilitas mushalla, sehingga peristiwa ini menjadi viral di sosial media, dan memantik reaksi keras umat Islam di Manado dan sekitarnya (M. I. dan S. A. Syuhudi, 2020).

Sementara itu, di Desa Punt Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, umat Islam menolak pembangunan gereja yang dimulai sejak 2009. Umat Islam menolak berdirinya gereja, karena lokasinya berdekatan masjid dan rumah penduduk Muslim. Namun, umat Kristen menolak menghentikan pembangunan gereja. Alasannya, mereka telah menghabiskan banyak biaya dan gereja ini satu-satunya gereja di desa tersebut (Firdaus, 2017). Di Jayapura, ada juga rumah ibadat (masjid dan mushalla) tetap dibiarkan berdiri dan digunakan untuk beribadah. Hanya saja, umat Kristen melarang masjid dan mushalla tersebut dipasang simbol identitas keagamaan di ruang publik, seperti kaligrafi, menara, dan toa (pengeras suara) (M. I. Syuhudi, 2019b). Kasus ini menjadi menarik, karena di satu sisi, umat Kristen tidak mempersoalkan mushalla dan masjid berdiri, tapi pada sisi lain, umat Islam tidak diberi kebebasan untuk mengekspresikan identitas keagamaan mereka di ruang publik.

Dari beberapa contoh kasus tersebut, dapat dipahami, bahwa pembangunan rumah ibadat di sejumlah daerah di Indonesia masih menemui jalan terjal. Masih sering dijumpai ada kelompok berbeda agama berselisih pendapat, bersitegang, melakukan aksi penolakan, dan pengrusakan terhadap rumah ibadat agama tertentu di Indonesia. Tak jarang pula, rencana pembangunan

rumah ibadat di beberapa daerah berujung kepada konflik. Tim Peneliti Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Balai Litbang Agama Makassar, ketika riset tentang Pembangunan Rumah Ibadat Pasca PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 di Kawasan Timur Indonesia (2014), menemukan riak-riak perselisihan berkenaan pembangunan rumah ibadat, yang mulai muncul sejak terbit Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006. Padahal, jauh sebelum regulasi tersebut terbit, beberapa daerah tidak pernah "ribut-ribut" dalam urusan pembangunan rumah ibadat. Riset ini juga menemukan, regulasi PBM ternyata sangat dibutuhkan untuk "menertibkan" rumah ibadat baru yang akan dibangun, sekaligus dimaksudkan agar kelompok agama tertentu (mayoritas) tidak "seenaknya" membangun rumah ibadat baru di tempatnya (Keagamaan, 2014).

Riset lain juga menunjukkan hasil menggembirakan. Setidaknya, ada juga kelompok berbeda agama hidup akur, ketika hendak membangun sebuah rumah ibadat. Di Komunitas Kokoda Babul Jannah, Kota Sorong, misalnya. Di komunitas ini, umat Islam dan Kristen bekerja sama dan gotong royong membangun masjid maupun gereja. Malah, ketua panitia pembangunan masjid adalah orang Kristen, sedangkan kepala tukang pembangunan gereja orang Islam (M. I. Syuhudi, 2019a).

Dari uraian di atas, riset ini kemudian menjadi penting, karena pertikaian akibat pembangunan rumah ibadat masih sering terjadi di Indonesia. Meski begitu, hal tersebut justru tidak terjadi di Kabupaten Soppeng. Umat Islam dan Kristen di Soppeng terlihat akur soal pembangunan rumah ibadat. Karena itu, artikel ini hendak mendeskripsikan *best practice* pembangunan rumah ibadat di Kabupaten Soppeng, serta fungsi kearifan lokal terkait pembangunan rumah ibadat.

## Kajian Teoritik

### Kearifan Lokal dalam Bingkai Pembangunan Rumah Ibadat

Perbincangan mengenai kearifan lokal kerap kali dikaitkan dengan masyarakat lokal. Oleh beberapa ahli, pengertian tentang kearifan lokal juga dimaknai bervariasi. Meski begitu, kearifan lokal pada dasarnya merupakan bagian dari kebudayaan. Para Antropolog, semisal Koentjaraningrat, Parsudi Suparlan, dan James Spradley, mengkategorisasi kebudayaan manusia menjadi wadah kearifan lokal yang mencakup idea, aktivitas sosial, dan artefak (Koentjaraningrat, 2009).

Pada bagian lain, Sartini, yang menulis "Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafat" (2004), menyebutkan, kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Sartini, 2004). Kongprasertamorn, saat meneliti masyarakat petani di Thailand, menemukan hal serupa. Menurutnya, kearifan lokal mengacu kepada pengetahuan yang berasal dari pengalaman suatu komunitas dan merupakan akumulasi pengetahuan lokal. Jadi, kata dia, kearifan lokal terdapat dalam masyarakat, komunitas, dan individu (Kongprasertamorn, 2007).

Kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai kebijaksanaan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*), dan kecerdasan setempat (*local genius*). Sementara itu, dari perspektif negara, kearifan lokal dirumuskan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia dalam "Memberdayakan Kearifan Lokal bagi Komunitas Adat Terpencil" (2006), sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas

yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka (Indonesia, 2006). Sistem pemenuhan kebutuhan masyarakat meliputi unsur kehidupan, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, bahasa dan komunikasi, serta kesenian (Permana, Raden Cecep Eka, 2011).

Dari beberapa uraian di atas, kearifan lokal dapat dipahami sebagai pandangan yang menjadi acuan masyarakat atau komunitas tertentu dalam berperilaku, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan rukun dan damai. Kearifan lokal tersebut juga telah dipraktikkan oleh masyarakat secara turun temurun demi memenuhi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan mereka (Permana, Raden Cecep Eka, 2011), termasuk dalam kehidupan masyarakat Soppeng. Selain itu, kearifan lokal juga merupakan pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas untuk menjawab berbagai masalah dan pemenuhan kebutuhan mereka.

Di sejumlah daerah, kearifan lokal sebagai instrumen untuk mendamaikan kelompok yang sedang bertikai sudah teruji. Di Sulawesi Utara, misalnya. Ketika umat Islam dan Kristen bertikai dalam urusan pembangunan rumah ibadat atau isu lain yang membawa-bawa nama agama, maka "*torang basaudara*" atau "kita semua bersaudara", menjadi kalimat pemersatu dan menjadi semacam "jimat", sekaligus menginterupsi kelompok yang sementara bertikai untuk segera menyelesaikan persoalan dengan cara-cara damai. Dalam arti kata, apabila ada peristiwa yang dikhawatirkan berdampak mengancam kerukunan, pemerintah setempat, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat, akan kembali menyebut-nyebut kearifan lokal mereka. Tujuannya, untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Bagi masyarakat

tertentu, kearifan lokal menjadi pengingat dan diyakini mampu menjadi "benteng" pertahanan, agar mereka dapat hidup damai dan rukun.

Dalam urusan pembangunan rumah ibadat, pemerintah selalu merujuk dan menjadikan regulasi PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 sebagai pedoman. Pada Pasal 14 PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 pada ayat dua, butir satu dan dua, disebutkan, pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

- a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
- c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota;
- d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 adalah Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat. Namun, apabila diteliti secara seksama, regulasi PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tidak hanya mengatur tentang pembangunan rumah ibadat, melainkan juga mengatur tugas-tugas dan kebijakan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) terkait membangun kerukunan umat beragama di daerahnya masing-masing.

Di dalam PBM tersebut dijelaskan pula kerukunan umat beragama merupakan keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi,

saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang menyajikan data lapangan secara deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen (jurnal, buku, dan laporan penelitian). Untuk menguji keabsahan data lapangan, dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi (Endraswara, 2006), sedangkan penentuan informan dilakukan secara sengaja (*purposive*), yaitu orang-orang yang memahami konteks penelitian, mudah diajak berbicara, dan memahami konteks penelitian ini (Kasniyah, 2012). Mereka adalah pegawai Kementerian Agama Kabupaten Soppeng, Pengurus FKUB Soppeng, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga lokal. Sementara, analisis data hasil penelitian menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (Endraswara, 2006).

## PEMBAHASAN

### Sosiodemografis Kabupaten Soppeng

Luas Kabupaten Soppeng adalah 1.500 Km<sup>2</sup>, yang terbagi ke dalam delapan kecamatan dan 70 desa atau kelurahan. Delapan kecamatan tersebut adalah Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, dan Marioriawa. Sementara itu, penduduk yang menghuni Soppeng berjumlah 226.990 jiwa (BPS, 2019), dan terdiri atas agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan

Buddha. Penduduk Soppeng kebanyakan memeluk Islam, yaitu 233.962 jiwa. Sedangkan Kristen (701 jiwa), Katolik (117 jiwa), Hindu (sembilan jiwa), dan Buddha (tujuh jiwa).

Soppeng dikenal juga sebagai "Kota Kalong" atau kelelawar. Suropto (2001), seperti dilansir di *merdeka.com*, menyatakan, kelelawar atau *Chiropetra* merupakan salah satu kelas mamalia yang memiliki sayap di kedua sisi kanan dan kiri tubuhnya. Kelelawar memiliki kemampuan terbang sempurna dan dapat melakukan *hovering* atau terbang di tempat maupun terbang mundur (Merdeka.com, n.d.). Soppeng disebut "Kota Kalong", karena kalong diyakini telah ada di daerah ini sejak berabad lalu. Adanya larangan menangkap dan membunuh kalong di Soppeng, disebabkan oleh cerita-cerita lisan warga setempat. Sebagian orang Soppeng meyakini, keberadaan kalong dianggap sebagai "pembaca" tanda-tanda alam. Selama kalong-kalong tersebut betah tinggal di pohon-pohonnya, Soppeng diyakini aman dari bencana alam. Saat ini, kalong-kalong tersebut terlihat berkerumun dan bergantung di salah satu pohon beringin di Kota Soppeng, depan Masjid Agung Soppeng. Hesmariyadi (2016) yang menulis "Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Soppeng terhadap Keberadaan Kelelawar (Studi Sosial Budaya)," menyebutkan, kalong telah ada di Soppeng sejak abad 12 dan berasal dari Pulau Jawa, yang bermigrasi ke Pulau Sulawesi, khususnya Soppeng. Hesmariyadi juga mengaitkan kehadiran kalong di Soppeng dengan kepercayaan masyarakat terhadap jodoh, peramal bencana atau musibah, serta simbol persatuan dan identitas sebagai orang Soppeng (Hesmariyadi, 2016).

### **Best Practice Pembangunan Rumah Ibadat: Melihat Relasi Islam-Kristen**

Seperti disebutkan di depan, umat Islam maupun umat Kristen tidak pernah mempersoalkan pendirian rumah

ibadat. Dikarenakan jumlah pemeluk Islam terbanyak di Soppeng, tulisan ini hanya fokus kepada gereja. Sebab, dalam beberapakasus, pemeluk agama mayoritas yang cenderung memperlakukan pembangunan rumah ibadat agama minoritas. Menariknya, kondisi seperti itu tidak tampak di Soppeng. Warga Muslim, termasuk yang bermukim di sekitar gereja, tidak pernah melarang renovasi maupun pemugaran gereja.

Semua gereja di Soppeng dibangun sebelum terbit Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang "Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat." Sementara itu, ada enam gereja di Soppeng, yaitu Gereja Katolik Paroki Santa Perawan Maria Bunda Pengharapan Suci, Gereja Toraja Jemaat Soppeng, dan Gereja Petra Pantekosta, serta tiga Gereja Kristen Sulawesi Selatan (GKSS) yang tergabung dalam Klasis Walanae; GKSS Jemaat Immanuel, GKSS Jemaat Saromase, dan GKSS Jemaat Batu Pute. Sedangkan masjid di Soppeng berjumlah 433 buah dan mushalla, 110 buah.

Dari enam gereja di Soppeng, GKSS Jemaat Immanuel dapat dikatakan gereja bersejarah. Kehadiran gereja ini berkaitan erat dengan awal masuknya Kristen dan menjadi "saksi bisu" orang Soppeng memeluk Kristen. Sayangnya, gereja yang terletak di Jalan Kesatria, Lalabata, Watansoppeng, ini tidak memiliki catatan tertulis perihal kapan dimulai pembangunan gereja. Namun, dari wawancara dengan pihak gereja, GKSS Jemaat Immanuel diperkirakan dibangun sekitar awal 1950-an. Hal ini merujuk pada Sekolah Kristen Oikumene yang dibangun pada 1957. Sejumlah informan menyebut, gereja duluan dibangun

ketimbang SD Kristen Oikumene. Posisi gereja dan sekolah letaknya berhadapan dan berada dalam satu pagar.

Memang, sudah banyak yang mengulas soal orang Bugis Kristen di Soppeng. Tulisan tersebut dituangkan, antara lain, Kadir Ahmad (Ahmad, 2015), Sitti Rahman (Rahman, 2016), Sitti Arafah (Arafah, 2017), dan Suhasran (Suhasran, 2018). Kecuali tulisan Arafah, beberapa tulisan tersebut tidak semuanya menyajikan alasan mengapa orang Bugis-Soppeng memeluk Kristen. Untuk melihat sejarah masuknya Kristen di Soppeng, tulisan ini mencoba menggali catatan-catatan sejarah melalui serangkaian wawancara berdasarkan ingatan sosial saksi hidup orang-orang lokal, yang kerap terpinggirkan dalam penulisan sejarah *mainstream*. Ingatan sosial penting artinya untuk penulisan sejarah sosial, lantaran dijiwai oleh kebanyakan anggota masyarakat. Sebagai pelaku maupun pendukung dari sebuah kebudayaan, masyarakat meyakini ingatan sosial sebagai masa lalu bersama, yang harus diingat sebagai pengetahuan dan kearifan, yang dapat digunakan sebagai penuntun ke masa depan.

Penuturan informan (emik) di lapangan, juga merupakan sumber kuat dan dapat menjadi rujukan penulisan sejarah. Apalagi, orang-orang yang diwawancarai termasuk pelaku maupun pendukung komunitas/kebudayaan tersebut. Purwati (2018), dalam tulisannya "Lemahnya Moral Kalangan Peserta Didik," yang dimuat di *jatengpos.co.id*, mengeluarkan *uneg-uneg*-nya terkait penulisan sejarah. Menurut Purwati, melemahnya idealisme, patriotisme, dan mengendapnya semangat kebangsaan, disebabkan narasi sejarah yang terlalu kental dengan wacana politik, yang di dalamnya mengandung kisah-kisah segelintir orang-orang yang diagungkan (Purwati, 2018).

Ganda Febri Kurniawan, dkk, (2019), dalam artikelnya, "Dominasi Orang-orang Besar dalam Sejarah Indonesia: Kritik Politik Historiografi dan Politik Ingatan," menyatakan, penulisan sejarah dalam buku teks masih saja diwarnai kisah-kisah heroisme yang lebih bermakna politik ketimbang estetik dan etis. Di samping itu, lanjut Ganda Febri Kurniawan, dkk. lagi, buku-buku teks saat ini masih dihiasi kajian tentang orang-orang besar (*big man*). Di toko-toko buku dan perpustakaan, misalnya, sejarah hanya disuguhkan dalam kisah-kisah heroisme dengan mengandalkan peranan *big man* (Kurniawan, 2019).

Hal serupa dikemukakan Agus Mulyana (2013), "Nasionalisme dan Militerisme: Ideologisasi Historiografi Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA." Menurutnya, narasi heroisme di dalam buku-buku yang mengisahkan kepahlawanan di tanah air cenderung bersifat politis. Padahal, inti dari kisah kepahlawanan adalah etika yang dapat dijadikan sumber refleksi buat generasi mendatang (Mulyana, 2013).

Masuknya agama Kristen di Soppeng tak lepas atas jasa Cambang La Galitik. Ia adalah orang pertama di Soppeng yang memeluk Kristen dan menjadi penginjil di daerah ini. Meski begitu, ada pula versi lain, sebagaimana dikatakan Zakariah J. Ngelow dalam tulisannya, "Refleksi GKSS (2017)", bahwa ada sebuah peristiwa penting terjadi di kalangan orang Bugis-Soppeng pada 1935, yaitu seorang bangsawan Bugis, Petta Lolo Marhabang, dibaptis di Soppengriaja (Arafah, 2017). Namun, pembaptisan paling fenomenal dan menjadi ingatan sosial umat Kristen di Soppeng, adalah pembaptisan "Cambang" La Galitik, La Mappe, dan La Tasakka, di Gereja Indische Kerk (GPIB) Immanuel Makassar, 17 Februari 1940. Penamaan Cambang yang melekat di

depan nama La Galitik, disebabkan oleh banyaknya bulu lebat tumbuh di pipi dan dagunya.

Menurut cerita Bodeng Yamin Galitik (84), anak Cambang La Galitik, yang ditemui di rumahnya di Soppeng, Februari 2021, ayahnya mulai melakukan pencarian spiritual pada 1938. Ayahnya dibaptis di Gereja Indische Kerk (GPIB) Immanuel Makassar pada 17 Februari 1940 bersama dua temannya dari Soppeng, La Mappede dan La Tasakka. Usai dibaptis, Cambang Galitik, La Mappede, dan La Tasakka, balik ke Soppeng, dan melakukan penginjilan di Pacongkang dan Takalalla hingga 1950.

Sejak Kristen mulai berkembang, Majelis Sinode Makassar mengutus seorang pendeta pada 1940. Pendeta pertama ini berasal dari Selayar, yang dipanggil Tuan Denso. Selama menetap di Soppeng, Tuan Denso diberikan tempat tinggal yang saat ini menjadi GKSS Jemaat Immanuel, di Jalan Kesatria. Tanah gereja ini dihibahkan oleh Datuk Andi Wana, datuk terakhir dan bupati pertama Soppeng (Wawancara tokoh Kristen Soppeng, Husain dan Kepala Sekolah SD Kristen Oikumene Soppeng, Yoice Ocktovina Soroeday, Februari 2021).

GKSS Jemaat Immanuel terletak di Jalan Kesatria, Lalabata, Watansoppeng, dan merupakan gereja tertua di daerah ini. Sayangnya, tidak ada catatan tertulis kapan gereja ini berdiri. Dari wawancara dengan pihak gereja diketahui, gereja ini diperkirakan dibangun pada awal 1950. Mereka mengacu pada Sekolah Kristen Oikumene yang dibangun pada 1957. Sejumlah informan menyebut, gereja terlebih dulu dibangun daripada SD Kristen Oikumene. Gereja dan sekolah sendiri letaknya berhadapan dan berada dalam satu halaman dan pagar. Sejak pertama kali GKSS Jemaat Immanuel dibangun hingga melakukan renovasi berkali-kali, tidak pernah terdengar ada

protes dari warga sekitar gereja dan umat Islam. Padahal, GKSS Jemaat Immanuel berada di pinggir jalan, yang di sekitarnya terdapat rumah penduduk Muslim. Sekitar beberapa meter, ada juga hotel dan Kampus STMIK Lamappapoleonro. Sementara itu, gereja-gereja lain meski berdiri di tahun berbeda, semuanya dibangun sebelum PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 terbit.

Lalu, bagaimana *best practice* pembangunan rumah ibadat di Soppeng? Pengurus FKUB Soppeng, Yunus, menyatakan, sejak terbit PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006, semua rumah ibadat yang akan dibangun harus menaati aturan tersebut. Akan tetapi, kalau sifatnya renovasi dan pemugaran, izin mendirikan bangunan (IMB) tidak lagi menjadi persyaratan utama. Asumsinya, bangunan lama tersebut pasti memiliki IMB, sehingga FKUB dan Kementerian Agama Soppeng hanya meminta persyaratan 90 jumlah pengguna rumah ibadat dan dukungan 60 masyarakat setempat. Selain itu, menariknya, dalam hal jumlah pengguna dan dukungan masyarakat setempat, FKUB dan Kementerian Agama Soppeng, ternyata memberikan keringanan. Misalnya, apabila rumah ibadat tersebut hanya mampu memenuhi 50 dari 90 pengguna rumah ibadat seperti yang dipersyaratkan, serta hanya mendapatkan 30 dari yang seharusnya, yaitu 60 dukungan masyarakat setempat, maka FKUB dan Kementerian Agama Soppeng tetap memberikan rekomendasi untuk merenovasi rumah ibadat tersebut. Sejauh ini, FKUB dan Kementerian Agama Soppeng tidak pernah mempersulit renovasi dan pembangunan rumah ibadat. Jadi, apa yang dilakukan FKUB dan Kementerian Agama Soppeng adalah bentuk-bentuk praktik toleransi beragama, sekaligus merawat kerukunan umat beragama di daerah ini.



Kehadiran enam gereja di pemukiman penduduk mayoritas Islam dipandang sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Warga Muslim di sekitar gereja malah akrab dengan pendeta maupun jemaat yang datang beribadah di gereja tersebut. Bahkan, ketika pihak gereja melakukan kerja bakti, seperti membersihkan sampah dan memotong rumput di sekitar gereja, beberapa warga Muslim yang tinggal dekat gereja ikut membantu. Sebaliknya, warga Kristen juga sering membantu umat Islam kerja bakti di sekitar masjid. Saling menghargai, menghormati, tolong menolong, dan kerja sama antara umat Islam dan Kristen bukanlah pemandangan baru di Soppeng. Kebiasaan tersebut telah berlangsung sejak lama dan dipraktikkan oleh orang tua terdahulu. Menurut Light, Keller, & Coulhoun, bekerja sama melakukan suatu kegiatan dapat mempererat kerukunan umat beragama. Sikap gotong royong merupakan nilai baik untuk menjadi pegangan masyarakat dalam kehidupan secara keseluruhan tanpa memandang identitas agama (Aslan, 2017).

Yoice Ocktovina Soroeday (48), Kepala Sekolah SD Kristen Oikumene Soppeng, dan Jemmy (54), guru senior di sekolah tersebut, dapat menjadi contoh untuk menggambarkan terciptanya relasi sosial yang harmonis antara umat Islam dan Kristen di Soppeng. Setiap ramadan, Yoice, ASN di Kementerian Agama Soppeng, selalu ikut teman-temannya yang beragama Islam berbagi takjil (buka puasa) di jalanan. Bagi Yoice, berbagi takjil merupakan momen paling ditunggu-tunggu setiap ramadan. Di luar kegiatan berbagi takjil, Yoice juga akrab dengan orang Islam. Ketika temannya menggelar hajatan sosial, Yoice selalu menghadiri untuk hadir. Sebaliknya, saat ia menggelar hajatan, ia juga mengundang teman-temannya Muslimnya. Bahkan, ketika ada teman atau tetangga meninggal, ia ikut melayat ke rumah duka dan mengikuti takziah.

Jemmy pun demikian dan namanya cukup terkenal di Soppeng. Pergaulannya luas. Salah satunya, ia aktif di komunitas motor "vespa tua" di Soppeng dan menjadi pembina. Di lingkungan tempat tinggalnya, Jemmy dipandang tokoh masyarakat. Buktinya, Jemmy terpilih menjadi Ketua Rukun Tetangga (RT) melalui pemilihan langsung. Padahal, Jemmy dan keluarga (istri dan empat anak) merupakan satu-satunya pemeluk Kristen di perkampungan itu. Setidaknya, relasi Islam-Kristen sudah tampak melebur dan tidak lagi menunjukkan sekat-sekat yang mengatasnamakan agama.

Relasi harmonis Islam-Kristen ditunjukkan juga saat hari-hari besar keagamaan. Misalnya, umat Islam umumnya memberikan ucapan selamat Natal kepada dan bertamu ke rumah teman-teman Kristennya. Bila Idul Fitri tiba, giliran umat Kristen berkunjung ke rumah teman-teman Muslimnya. Selain itu, ketika ibadah Natal dan Tahun Baru digelar di gereja, pasukan Barisan Serba Guna (Banser) GP Ansor Soppeng melakukan penjagaan di gereja. Penjagaan di sini bukan dimaksudkan, bahwa gereja tersebut tidak aman, atau ada oknum tertentu yang siap menyerang atau mengganggu perayaan Natal dan Tahun Baru. Menurut Pengurus FKUB Soppeng, Yunus, penjagaan gereja itu merupakan bentuk kepedulian umat Islam terhadap umat Kristen, sekaligus menegaskan relasi Islam-Kristen rukun dan damai.

### **Kearifan Lokal Masyarakat Soppeng** *Keluarga dan kerabat beda agama*

Adanya hubungan persaudaraan dan kekerabatan antara umat Islam dan umat Kristen di Soppeng menjadi salah satu penyebab pembangunan rumah ibadat berjalan lancar dan tanpa kendala. Terlebih, sejak awal, umat Islam maupun

umat Kristen menyerahkan sepenuhnya persoalan pembangunan rumah ibadat kepada pemerintah. Sepanjang panitia pembangunan rumah ibadat dianggap memenuhi persyaratan PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006, masyarakat tidak mempersoalkannya. Lagipula, selama ini, masyarakat Soppeng belum pernah bertengkar atau konflik akibat rumah ibadat. Hal ini menunjukkan, bahwa toleransi beragama dan kerukunan umat beragama berjalan baik di Soppeng.

Terkait adanya orang Soppeng memiliki saudara dan kerabat beda agama, hal ini berkorelasi dengan sejarah masuknya Kristen di Soppeng. Namun, perbedaan agama tersebut tidak mengganggu hubungan di antara mereka. Bahkan, masih sering ditemui saudara atau kerabat yang berbeda agama tinggal di dalam satu rumah. Hilda, misalnya. Ia orang Soppeng-Kristen yang menikahi sesama orang Bugis Soppeng Muslim. Selama hidup berumah tangga, mereka hidup satu atap. Ketika anaknya lahir, ia mengikuti agama bapaknya (Muslim). Begitupula ketika suaminya meninggal, anaknya tetap hidup serumah dengan dirinya, bersama menantu dan cucunya yang beragama Islam. Di Soppeng, seorang anak dapat menerima saudara kandungnya yang berbeda agama. Orang tua juga dapat menerima anaknya memeluk Islam atau Kristen, meskipun orang tua sendiri menganut agama berbeda. Bahkan, Alisa (46, Kristen), selalu membangunkan dan menyiapkan makan sahur dan menu buka puasa buat suami dan anaknya di rumah.

Toleransi umat beragama di Soppeng, diulas pula dalam tulisan Sitti Rahman (2016). Rahman menyebut, tumbuhnya sikap toleransi pada masyarakat Soppeng merupakan warisan dari satu generasi ke generasi, termasuk masih adanya orang Bugis-Soppeng memeluk agama berbeda (Rahman, 2016). Yunus, Pengurus FKUB Soppeng,

mengemukakan, sikap menghargai dan menghormati orang berbeda agama merupakan “doktrin” dari orang tua dan neneknya. Alhasil, ketika daerah lain ribut-ribut soal berdirinya rumah ibadat atau larangan umat muslim mengucapkan selamat Natal kepada pemeluk Kristen, hal tersebut tidak terjadi di Soppeng. Kalau dua pemeluk agama ini terlibat keributan, itu sama saja ribut dengan keluarga sendiri.

### *“Iyassi Soppengngi”; Soppeng milik kita bersama*

Kearifan lokal di berbagai daerah merupakan kekayaan budaya yang mesti dimunculkan kembali ke permukaan sebagai bentuk jati diri bangsa. Sejauh ini, kearifan lokal kerap dikonsepsikan sebagai kebijaksanaan, pengetahuan, maupun kecerdasan masyarakat tempatan (*local wisdom, local knowledge, maupun local genius*) masyarakat tempatan untuk menjawab berbagai permasalahan dalam kebutuhan hidup mereka. Termasuk, apabila di suatu kampung atau daerah terjadi pertengkar antar sesama warga menyangkut kehidupan sosial keagamaan, para tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah, kemudian mengisahkan perjalanan kehidupan orang-orang tua dulu yang hidup damai. Hal ini dimaksudkan, supaya mereka mengikuti jejak orang mereka yang hidup rukun.

Namun, persepsi dan tindakan tersebut sama sekali tidak keliru. Hanya saja, yang perlu digarisbawahi, kearifan lokal di setiap daerah bukanlah bermaksud untuk mengingat masa-masa indah tentang masa silam, atau meromantisir kisah-kisah indah masa lalu yang dijalani leluhur. Karenanya, dalam hal ini, saya bersetuju dengan Syamsul Maarif, saat menuangkan “Kata Pengantar” dalam buku “Mutiarra Terpendam; Potensi Kearifan Lokal

untuk Perdamaian di Tanah Papua." Syamsul Ma'rif dalam Kata Pengantar tersebut menyebutkan, kearifan lokal dapat juga dipahami sebagai sistem budaya yang diciptakan, direproduksi, dan digunakan oleh komunitas untuk mencapai tujuan komunitasnya. Sebagai sistem budaya, kearifan lokal merupakan instrumen untuk mengembangkan multikulturalisme yang menekankan pentingnya pengakuan, penerimaan, penghargaan, dan perayaan perbedaan (Asyhari, 2015).

Dalam konteks kehidupan dan hubungan manusia dengan manusia serta komunitas, kearifan lokal dapat dijadikan modal sosial untuk menciptakan masyarakat kondusif. Secara fungsional, memahami kearifan lokal di tengah kehidupan multikultural dan multiagama dapat menciptakan dan melahirkan kehidupan yang rukun, harmonis, saling menghormati, dan saling menghargai antara sesama umat beragama (Sudarma, 2007). Selain petuah-petuah atau pesan leluhur yang masih tertanam kuat serta dipraktikkan oleh masyarakat, ikatan persaudaraan (saudarakandung) maupun kerabat beda agama (Islam dan Kristen) juga menjadi penyebab masyarakat hidup rukun dan damai di Soppeng.

Masyarakat Soppeng mengenal beberapa kearifan lokal, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. *Ati mapaccing* atau bawaan hati yang baik. Hal ini diartikan, bahwa bawaan hati yang baik itu mengandung tiga makna, yaitu menyucikan hati, bermaksud lurus, dan mengatur emosi.
- b. *Amaradekangeng* (demokrasi), yang berarti merdeka atau bebas.
- c. *Assimellerengeng* (kesetiakawanan sosial). Hal ini mengandung makna kesehatan, kerukunan, kesatupaduan antara anggota keluarga lain, antara seorang sahabat dengan sahabat

lain. *Assimellerengeng* ini dapat juga dimaknai sebagai memiliki rasa kekeluargaan tinggi, setia kawan, dan cepat merasakan penderitaan orang lain.

- d. *Mappasitinaja* (kepatutan), yang berarti berkata atau berbuat sepiantasnya dalam memperlakukan seseorang (Abdurrahman, 2007).

Selain kearifan lokal di atas, ada juga kearifan lokal yang disebut *Pada idi'*, yang secara fungsional dianggap mampu meredam ketegangan dan pertikaian yang terjadi di masyarakat. Namun, *Pada idi'* tidak hanya berlaku untuk masyarakat Soppeng, melainkan untuk orang Bugis pada umumnya. Secara harfiah, *Pada idi'* berarti "sesama kita", dan karenanya, selaras dengan arti toleransi, yaitu menghargai perbedaan. *Pada idi'* juga berperan menciptakan pola pikir yang tidak melulu mencari titik beda antarumat beragama. Segala ketegangan dan pertikaian yang terjadi di Soppeng akan segera mereda ketika orang-orang menyebutkan *Pada idi'*. Bagi warga Soppeng, *Pada idi'* bukanlah untuk saling menyakiti, melainkan ajakan untuk saling mengayomi antarsesama tanpa melihat identitas keagamaan (Ahmad, 2015).

Dari sekian kearifan lokal tersebut, ada satu kearifan lokal yang menarik dicermati di Soppeng. Kearifan lokal ini tak hanya difungsikan untuk menyatukan semua identitas sosial menjadi satu, tetapi juga digunakan untuk kepentingan politik (pemilihan kepala daerah). Kearifan lokal tersebut adalah *Iyassi Soppengngi* atau "Soppeng Milik Kita Bersama." Bagi orang Soppeng, *Iyassi Soppengngi* memiliki makna yang sungguh mendalam. Coba resapi dalam-dalam kata demi kata dari "Soppeng Milik Kita Bersama." Sebagai orang Soppeng, "milik bersama" adalah sebuah kepemilikan. Ibarat rumah sendiri, kita tentu tak ingin merusak rumah sendiri yang kita bangun dengan bersusah payah. Rumah yang

kita tinggal bersama keluarga harus selalu dijaga dan dirawat terus menerus, supaya bangunannya tetap kokoh dan tidak mudah rubuh di makan usia. Suatu waktu, kita akan mewarisi rumah ini kepada anak dan cucu. Maka, kita pun berpesan agar mereka ikut merawat dan menjaga rumah milik bersama itu.

Pengurus FKUB Soppeng dan pegawai di Kemenag Soppeng, Yunus, menuturkan:

*“Ada prinsip yang selama ini tertanam di Soppeng, yaitu Iyassi Soppengngi. Maksudnya, Soppeng ini milik kita bersama. Jadi, apa yang kira-kira Soppeng butuhkan, ayo kita semua keroyok tanpa memandang identitas. Dampaknya, kalau Iyassi Soppengngi ini terus-menerus menjadi pijakan masyarakat, maka tidak ada lagi gesekan-gesekan, karena kita sama-sama merasa memiliki Soppeng dan Soppeng milik kita bersama, sehingga kita tidak menginginkan hal-hal buruk menimpa Soppeng. Ketika Soppeng merasa sakit, maka ayo semua kita bersama-sama menyembuhkannya.”* (Wawancara Yunus, Maret 2021, di Soppeng).

*Iyassi Soppengngi* tidak muncul begitu saja pada masyarakat Soppeng. Pesan ini muncul dari para orang tua yang dituturkan secara turun temurun dari orang tua. Dengan *Iyassi Soppengngi*, orang tua di Soppeng kemudian mendoktrin anak-anaknya untuk bersama-sama menjaga nama Soppeng, termasuk dalam hal toleransi dan kerukunan umat beragama. Belakangan, karena dipandang berhasil menyatukan warga Soppeng, *Iyassi Soppengngi* dipergunakan juga dalam ranah politik. Setidaknya, ini dilakukan pasangan Kaswadi Razak – Luthfi Halide, saat mereka terpilih menjadi Bupati Soppeng periode 2021-2024. Saat mencalonkan diri

menjadi bakal calon bupati, pasangan ini tak punya lawan. Mereka kemudian maju melawan kotak kosong, dan menang dengan perolehan suara 86,3 persen.

Tidak adanya bakal calon lain Bupati Soppeng, ternyata tidak terjadi begitu saja. Sejumlah informan di Soppeng menyatakan, Kaswadi Razak dan timnya sejak kampanye awal kerap menggaungkan *Iyassi Soppengngi* kepada masyarakat Soppeng. Dengan berpegang kepada kearifan lokal tersebut, pasangan ini kemudian memosisikan dirinya sebagai satu-satunya yang dapat memimpin dan membangun daerahnya bersama masyarakat Soppeng. Alhasil, tidak ada pasangan lain yang berani maju untuk menjadi bakal calon menantang Kaswadi Razak – Luthfi Halide.

Di tangan pasangan Kaswadi Razak-Luthfi Halide dan timnya, *Iyassi Soppengngi* ternyata memiliki daya tarik magnet yang kuat. Ia sebenarnya tidak menghilangkan makna sesungguhnya dari “Soppeng Milik Kita Bersama”. Akan tetapi, ia, meminjam kalimat Maarif (2015), berhasil memahami kearifan lokal *Iyassi Soppengngi* sebagai sistem budaya yang diciptakan, direproduksi, dan digunakan oleh komunitas tertentu untuk mencapai tujuan komunitasnya, atau pendukung kebudayaan tersebut. Bahkan, untuk menarik simpati masyarakat Sopepeng (dalam kasus pilkada), *Iyassi Soppengngi* kemudian ditafsirkan ulang oleh kelompok tertentu berdasarkan kepentingannya.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, relasi yang terbangun antara umat Islam dan umat Kristen di Soppeng, cukup bagus. Ini dapat dilihat dengan tidak adanya sekat-sekat sosial yang membatasi pergaulan dan interaksi dua pemeluk agama ini di

ruang-ruang publik. Sejauh ini, umat Islam dan Kristen belum pernah bertikai, bersitegang, apalagi konflik, yang mengatasnamakan agama, termasuk dalam urusan pembangunan dan renovasi rumah ibadat. Sebagai penganut agama terbanyak di daerah ini, umat Islam tidak pernah memperlakukan kehadiran enam gereja serta lokasi gereja tersebut, di mana banyak umat Islam bermukim di sekitar gereja. Bahkan, ketika gereja akan direnovasi dan direnovasi berkali-kali, umat Islam tidak pernah melakukan aksi protes. Seperti disebutkan di atas, semua gereja di Soppeng dibangun sebelum terbit PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006. GKSS Jemaat Immanuel termasuk gereja tertua yang berdiri sekitar awal 1950 dan menjadi "saksi bisu" orang Soppeng memeluk Kristen.

Toleransi dan kerukunan umat beragama juga menunjukkan hasil yang sangat bagus di Soppeng. Selain memiliki saudara kandung, orang tua dan anak, dan kerabat berbeda agama, sebagian orang Soppeng juga hidup rukun dan damai walau mereka tinggal satu rumah.

Identitas sosial orang Soppeng dapat juga menyatu berkat kearifan lokal *Iyassi Soppengngi* atau Soppeng Milik Kita Bersama. Kearifan lokal ini merupakan petuah dari orang tua terdahulu buat anak-anaknya, yang kemudian dilanjutkan dan dipraktikkan lagi oleh generasi sekarang. Namun, belakangan ini, kelompok atau komunitas tertentu berhasil menafsirkan ulang *Iyassi Soppengngi* demi meraup massa politik pada pemilihan Bupati Soppeng periode 2021-2024.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, dan sejumlah informan di lapangan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data terkait penelitian ini. Tak lupa pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada jajaran Dewan Redaksi Pengelola Jurnal Harmoni Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan yang bersedia memuat artikel ini.

### DAFTAR ACUAN

- Abdurrahman. (2007). *Pelestarian Kearifan Lokal melalui Pewarisan Bahasa Bugis*, disajikan pada Kongres I Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Selatan, Makassar, 22-25 Juli 2007.
- Ahmad, A. K. (2015). *Laporan Penelitian Penyuluh Agama dan Kerukunan Umat Beragama di Soppeng*.
- Arafah, S. (2017). Islam dan Kristen di tanah Bugis Soppeng (sejarah dan perkembangannya). *Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan*, 55(2), 151-164.
- Aslan. (2017). *Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Budaya Pantang Larang Suku Melayu Sambas*. *Ilmu Ushuluddin*, 1(16), 1-10.
- Asyhari, B.-A. (2015). *Mutiara Terpendam Papua (Potensi Kearifan Lokal Untuk Perdamaian di Tanah Papua)*

- BPS. (2019). *Kabupaten Soppeng dalam Angka 2020*.
- Endraswara, S. (2006). *Metode, teori, teknik penelitian kebudayaan: ideologi, epistemologi, dan aplikasi*. Sleman: Pustaka Widyatama.
- Firdaus. (2017). Konflik Pembangunan Rumah Ibadah di Desa Pundi Kayu Kecamatan Batang Pranap Kabupaten Indragirihulu. *JOM FISIP*, 4(2), 1–10.
- Hesmariyadi. (2016). *Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Soppeng terhadap Keberadaan Kelelawar (Studi Sosial Budaya)*. Universitas Negeri Makassar.
- Indonesia, D. S. R. (2006). *Memberdayakan Kearifan Lokal bagi Komunitas Adat Terpencil*.
- Jamaluddin, A. N. (2018). Konflik dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bekasi. *Sosio Politica*, 8(2), 227–238.
- Kasniyah, N. (2012). *Tahapan menentukan informan dalam penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Ombak.
- Keagamaan, T. P. B. B. A. dan L. (2014). *Laporan Penelitian Implementasi Pendirian Rumah Ibadat Pasca PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 di Kawasan Timur Indonesia*.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Aksara Baru.
- Kongprasertamorn, K. (2007). Local wisdom, environmental protection and community development: the clam farmers in Tabon Bangkhusai, Phetchaburi Province, Thailand. *Manusya: Journal of Humanities*, 101–110.
- Kurniawan, D. (2019). Dominasi Orang-Orang Besar dalam Sejarah Indonesia: Kritik Politik Historiografi dan Politik Ingatan. *Sejarah Citra Lekha*, 4(1), 36–52.
- Merdeka.com. (n.d.). Mengenal Ciri-Ciri Kelelawar Serta Klasifikasi dan Habitatnya, Menarik Diketahui. <https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-ciri-ciri-kelelawar-serta-klasifikasi-dan-habitatnya-menarik-diketahui-kl.html?Page=all>, Diakses 24 Juli 2021.
- Mulyana, A. (2013). Nasionalisme dan Militerisme: Ideologi Historiografi Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA. *Paramita: Historical Studies Journal*, 21(1), 78–87.
- Permana, Raden Cecep Eka, D. (2011). Kearifan Lokal tentang Mitigasi Bencana pada Masyarakat Baduy. *MAKARA, Sosial Humaniora*, 15(1), 67–76.
- Purwati. (2018). Lemahnya Moral di Kalangan Peserta Didik. <http://jatengpos.co.id/lemahnya-moral-di-kalangan-peserta-didik/> Accessed 21 Februari 2021.
- Rahman, S. (2016). Toleransi Masyarakat Islam dan Kristen di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng pada tahun 1950-2007. *Walasuji Volume*, 7(2), 551–565.
- Sanusi, A. (1999). *Agama di tengah kemiskinan, refleksi atas pandangan Islam dan Kristen dalam perspektif kerjasama antar umat beragama*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Sartini. (2004). Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafat. *Jurnal Filsafat*, 111–120.
- Sudarma, I. K. (2007). *Laporan Penelitian: Studi Analisis Kebutuhan Pendidikan Multikultural Berbasis Kompetensi pada Siswa Sekolah Dasar di Kota Singaraja*.
- Suhasran. (2018). *Skripsi, Pola Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Soppeng*

Syuhudi, M. I. (2019a). *Laporan Penelitian Best Practice Kerukunan Umat Beragama pada Komunitas Kokoda Babul Jannah Kota Sorong.*

Syuhudi, M. I. (2019b). *Laporan Penelitian Dinamika Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat Perbatasan di Muara Tami Jayapura.*

Syuhudi, M. I. dan S. A. (2020). *Laporan Hasil Fact Finding Kasus Penyerangan Mushalla Al-Hidayah di Perum Griya Agape Minahasa Utara, Sulawesi Utara.*